

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia pembangunan ekonomi masih menjadi prioritas utama, banyak yang di hadapi sehubungan dengan ekonomi. Pembangunan nasional dapat di laksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berhasil memperbaiki kondisi perekonomian di indonesia. Perbaikan masalah ekonomi ini dapat di tempuh dengan jalan memanfaatkan sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Sumber daya manusia tentu adalah hal yang sangat penting dalam pengembangan dan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada, karena sumber daya manusia yang rendah bisa menyebabkan kondisi masyarakat yang kurang mampu melihat dan juga mengatasi masalah di dalam kehidupan khususnya masalah ekonomi, yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan akan berdampak pula pada peningkatan tingkat kemiskinan. Garis kemiskinan Indonesia secara normal pada maret tahun 2019 terhitung Rp 425.250, Adanya margin tersebut penduduk miskin di Indonesia sampai 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen. Tingkat kemiskinan dari tahun 1999-2019 mengalami kemajuan baik dari sisi persentase ataupun jumlah penduduk miskinnya yang selalu mengalami penurunan. Penduduk miskin pada tahun 1999 terhitung sebanyak 47,97 juta jiwa (23, 43 persen) kemudian turun menjadi 25,14 juta jiwa (9,41 persen) Maret 2019 berdasarkan dari data statistik Indonesia. Periode yang sama, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan menampilkan bentuk yang searah yaitu berbentuk penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 1999 tertulis berturutan sebesar 4,33 dan 1,23 kemudian menurun pada maret 2019 menjadi 1,55 dan 0,37. Salah satu karakteristik kemiskinan di Indonesia adalah tingginya disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2019 di perkotaan sebesar 6,69 persen (9,99 juta orang) dengan garis kemiskinan sebesar Rp 442.063, Daerah perdesaan tercatat hampir dua kalinya yaitu sebesar 12,85 persen (15,15 juta orang) dengan garis kemiskinan sebesar Rp 404.39.

Dalam al-Qur`an, kata miskin dalam bentuk jamaknya yaitu *masaakin* yang di gunakan untuk menyebutkan kelompok yang berhak menerima bagian dari zakat (at-Taubah ayat 60):

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرِيْمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemaahan:

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin. Pengurus-pengurus zakat, para mua'allaf yang di bujuk hatinya, untuk (merendahkan budak), dan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketepatan yang di wajibkan oleh Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*”. (QS AT-Taubah: 60)

Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam perekonomian yang harus dicarikan solusi untuk menyelesaikannya, hal ini tentu saja sangat penting diperhatikan agar terselesaikan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa daerah yang memiliki persentase tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain contohnya di Pulau Jawa, hal ini tentu saja disebabkan oleh banyak aspek, seperti minim nya lapangan kerja, kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai yang disebabkan dengan minimnya pengetahuan, ketergantungan masyarakat pada satu sektor mata pencaharian, kurang memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk dijadikan sumber mata pencaharian, dan lain sebagainya. (Nasir, 2008).

Pentingnya masalah kemiskinan untuk segera diatasi berkaitan dengan pemenuhan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Hal ini seperti yang diamatkan oleh pasal 28 H ayat (1) Ubdang-Undang dasar republik indonesia 1945 bahwasanya “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesejahteraan”. Dalam rangka pemenuhan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sebagai salah satu upaya mengatasi masalah kemiskinan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomer 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Sasran utama yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah setiap warga negara yang tertagori mengalami masalah kesejahteraan sosial, yaitu mereka yang miskin, terpencil, rentan sosial ekonomi. Sejak di berlakukannya undang-undang tentang penanganan fakir miskin, pemerintah pusat maupun daerah telah menggulirkan berbagai progam di masyarakat sebagai upaya mengatasi kemiskinan, baik yang bersifat bantuan maupun pemberdayaan. Namun secara umun belum diketahui bagaimana program-program kemsikinan tersebut berjalan dan bagaimana manfaat yang disarankan oleh penerima program. (Tukiran, 2010).

Terkait dengan persoalan kemiskinan, sektor pariwisata merupakan salah satu faktor yang cukup strategis dalam memecahkan persoalan kemiskinan. Hal ini di karenakan sektor pariwisata diyakini tidak hanya sekedar mampu menjadi sektor andalan dalam usaha meningkatkan persoalan devisa untuk pembangunan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam rangka mengetaskan kemiskinan.(Yoeti, 2008).

Beberapa konstribusi yang diperoleh dari pengembangan pariwisata seperti lapangan pekerjaan baru, peningkatan pendapatan masyarakat, peneingkatan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah, mendorong peningkatan investasi

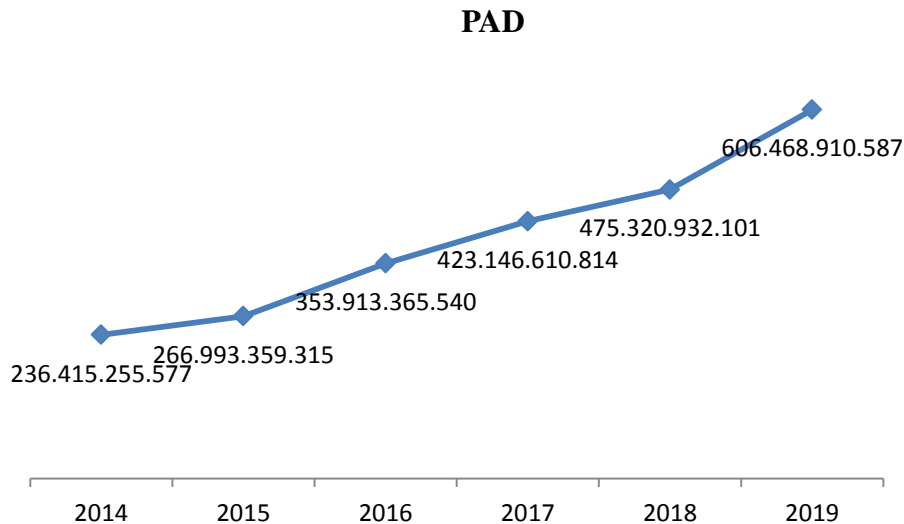
dari sektor industri pariwisata dan sektor ekonomi lainnya. Dengan demikian sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. (I Putu Anom, 2010).

Tabel 1.1.
Tingkat kemiskinan provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur tahun 2014-2019 (Dalam persen (%))

PROVINSI	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
						SEM 1	SEM2
JAWA BARAT	8,47	8,58	7,55	6,67	6,33	6,03	5,98
JAWA TENGAH	12,68	11,50	11,38	10,55	9,67	9,20	8,99
D.I.Y.	13,81	11,93	11,68	11,00	10,73	10,89	10,62
JAWA TIMUR	8,35	8,41	7,91	7,13	6,97	6,84	6,77

Sumber: Badan Pusat Statistika

Data diatas menunjukkan bahwa provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) memiliki tingkat kemiskinan yang tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Akan tetapi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tingkat kemiskinan menurun pada setiap tahunnya. Hal ini tentunya di pengaruhi oleh berbagai aspek salah satunya aspek pariwisata karena mengingat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan destinasi wisata yang cukup di gemari oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.



Sumber : buku statistik kepariwisataan DIY 2019

Gambar 1.1
 Jumlah PAD Sektor Pariwisata Provinsi DIY
 Tahun 2014-2019

Gambar diatas menunjukkan meningkatnya PAD sektor wisata setiap tahunnya di Provinsi DIY yang kemudian tentunya memberikan dampak positif untuk pemasukan daerah di Provinsi DIY yang disebut dengan pendapatan asli daerah sektor pariwisata. Peningkatan PAD sub sektor pariwisata ini juga dipengaruhi oleh berkembangnya tempat pariwisata yang sangat pesat yang kemudian menjadikan sumber daya alam di Provinsi DIY berubah menjadi tempat wisata yang menarik para wisatawan sektor berkunjung Yogyakarta dan meningkatkan penghasilan asli daerah sektor pariwisata di DIY.

PAD sektor pariwisata yang meningkat ini diharapkan bisa memberikan dampak yang baik pula untuk mengurangi tingkat kemiskinan di provinsi DIY.

Tabel 1.2.
 Data persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota
 Provinsi DIY Tahun 2014-2019

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (Persen)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
D.I.Y.	14,55	14,91	13,34	13,02	12,13	11,70
Kulonprogo	20,64	21,40	20,30	20,03	18,30	17,39
Bantul	15,89	16,33	14,55	14,07	13,43	12,92
Gunungkidul	20,83	21,73	19,34	18,65	17,12	16,61
Sleman	9,50	9,46	8,21	8,13	7,65	7,41
Yogyakarta	8,67	8,75	7,70	7,64	6,98	6,84

Sumber data:Badan Pusat Statistika

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta berkurang pada tahun 2014 dengan nilai 14,55. Dan meningkat pada tahun 2015 dengan nilai 14,91. Dan kemudian tingkat kemiskinan pada tahun 2016-2019 berkurang.

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka judul dari penelitian ini adalah **“DAMPAK PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2019”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat ada begitu banyak masalah yang harus dipecahkan dalam analisis ini, agar pembahasan tidak terlalu luas dan tetap mengarah sesuai dengan judul yang di ambil, maka perlu adanya pembatasan masalah.dalam hal ini penulis berfokus pada

Mengingat ada begitu banyak masalah yang harus dipecahkan dalam analisis ini, agar pembahasan tidak terlalu luas dan tetap mengarah sesuai dengan judul yang diambil, maka perlu adanya pembatasan masalah.Dalam hal ini penulis berfokus pada pengembangan pariwisata guna pengurangan kemiskinan di provinsi DIY. Pada penelitian ini terdapat faktor yang mempengaruhi yakni: Penerimaan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata, Jumlah wisatawan, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran.

C. Rumusan Masalah

Provinsi DIY dikenal dengan jumlah tempat wisatanya yang beragam, akan tetapi provinsi DIY juga dikenal dengan salah satu provinsi yang miskin di Pulau Jawa. Dengan potensi pariwisata diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di DIY. Pengembangan pariwisata guna menurunkan tingkat kemiskinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni Penerimaan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata, Jumlah wisatawan, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran.

Maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah sektor pariwisata mempengaruhi tingkat kemiskinan DIY?
2. Apakah jumlah wisatawan mempengaruhi tingkat kemiskinan DIY?
3. Apakah jumlah hotel mempengaruhi tingkat kemiskinan DIY?
4. Apakah jumlah restoran mempengaruhi tingkat kemiskinan DIY?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, batasan masalah, dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata terhadap tingkat kemiskinan di DIY.
2. Mengetahui pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap tingkat kemiskinan di DIY.
3. Mengetahui pengaruh Jumlah Hotel terhadap tingkat kemiskinan di DIY.
4. Mengetahui pengaruh Jumlah Restoran terhadap tingkat kemiskinan di DIY.

E. Manfaat Penelitian

Dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait serta instansi yang terkait:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Analisis Pengembangan Sektor Pariwisata Guna Pengurangan Kemiskinan.

2. Bagi Peneliti

Selanjutnya Diharapkan dapat meningkatkan motivasi, wawasan dan pengetahuan yang lebih luas lagi dan juga dapat dijadikan bahas referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan membutuhkannya.

3. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah guna mengambil kebijakan dalam rangka menjalankan upaya dalam pengembangan pariwisata guna pengurangan kemiskinan. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan di masa yang akan datang.